

Gerakan Sosial dalam Penolakan Pertambangan di Sungai Saddang

Kurnia Sulistiani, Muhammad Alhamid, Gustiana A. Kambo

Universitas Hasanuddin

e-mail: kurniasulistiani378@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang gerakan sosial yang muncul sebagai respons terhadap rencana tambang ilegal di Sungai Saddang, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Gerakan yang dikenal dengan nama Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo ini berupaya menolak aktivitas tambang tersebut karena alasan perizinannya yang tidak lengkap serta ketidakikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan dengar pendapat. Selain itu, masyarakat juga merasa trauma akibat pengalihan pasir di sungai sebelumnya yang menyebabkan abrasi, banjir, dan longsor. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh gerakan ini dalam menanggapi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan teori mobilisasi sumber daya dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo melakukan beberapa langkah strategis, termasuk mengumpulkan massa dan anggota, menjalin relasi dengan pihak-pihak terkait, serta melaksanakan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan. Proses mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh gerakan ini mencakup peran penting pemimpin yang memobilisasi sumber daya kelompok, dukungan dari pengikut, dukungan dana, keahlian profesional yang terlibat, serta akses media yang mendukung kelancaran aksi mereka.

Kata Kunci:

Gerakan Sosial, Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo, Strategi, Mobilisasi Sumber Daya

PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia (Estefania et al., 2021), mengingat kekayaan alam yang dimiliki oleh negara ini, baik dalam bentuk mineral maupun batu bara. Aktivitas pertambangan di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara

optimal untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang menyatakan bahwa *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Meskipun sektor pertambangan memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi, terdapat pula banyak tan-

tangan yang muncul akibat praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan merusak lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu daerah yang mengalami masalah serupa adalah Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Salipolo, Kecamatan Cempa. Kabupaten ini kaya akan sumber daya alam, terutama pasir yang banyak dijumpai di sepanjang Sungai Saddang, salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Sulawesi Selatan (Nursam, 2019). Keberadaan sumber daya alam ini membuat wilayah tersebut menjadi target kegiatan pertambangan pasir, yang meskipun berpotensi mendatangkan keuntungan, juga membawa risiko kerusakan lingkungan yang signifikan (Bachtiar, 2019). Masyarakat Desa Salipolo, yang tinggal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang, merasa terancam oleh potensi dampak buruk dari aktivitas pertambangan tersebut, seperti banjir, abrasi, dan longsor. Kejadian besar yang terjadi pada tahun 1998 dan 2010, di mana luapan sungai menyebabkan kerusakan parah pada tanah-tanah pertanian dan pemukiman warga, menambah rasa trauma masyarakat terhadap aktivitas pertambangan di wilayah mereka (Fatir, 2019).

Trauma akibat bencana tersebut telah memunculkan penolakan yang kuat terhadap aktivitas pertambangan pasir ilegal di Desa Salipolo. Masyarakat tidak hanya merasa bahwa kegiatan pertambangan ilegal ini merusak lingkungan, tetapi juga mengabaikan hak mereka untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pen-

gelolaan sumber daya alam di daerah mereka. Hal ini memunculkan gerakan sosial yang dikenal sebagai Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo, yang berupaya menanggulangi kegiatan pertambangan ilegal dan memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik dan aman. Penolakan ini dilakukan karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses perizinan dan pengambilan keputusan mengenai pertambangan, serta tidak ada upaya yang cukup untuk menilai dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan tersebut.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang digunakan oleh Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo dalam menanggapi masalah pertambangan ilegal di Desa Salipolo. Gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk menanggapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pertambangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat dapat terlibat dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana gerakan sosial ini berhasil memobilisasi sumber daya, seperti dukungan masyarakat, dana, dan media, untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Penelitian ini juga memiliki kebaruan dalam hal pendekatan analisis terhadap gerakan sosial yang berfokus pada penolakan terhadap pertambangan ilegal, khususnya dalam konteks peran mobilisasi sumber daya yang dimainkan oleh masyarakat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada dampak lingkungan dari pertambangan, penelitian ini akan melihat bagaimana masyarakat dapat mengorganisir diri mereka untuk mempengaruhi kebijakan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman baru mengenai bagaimana gerakan sosial di tingkat desa dapat mengatasi masalah lingkungan dan sosial yang dihadapi, serta bagaimana mereka memobilisasi berbagai sumber daya untuk mendukung perjuangan mereka.

Permasalahan yang berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi yang digunakan oleh Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo dalam menanggapi penolakan terhadap pertambangan pasir ilegal di Desa Salipolo, serta bagaimana proses mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh gerakan ini untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh gerakan ini dalam mengorganisir aksi penolakan dan bagaimana mereka menghadapinya. Dalam menjawab rumusan masalah ini, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali berbagai informasi dan data yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Salipolo.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi yang digunakan oleh Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo dalam menanggulangi masalah pertambangan ile-

gal di wilayah mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana gerakan ini memobilisasi sumber daya, seperti dukungan masyarakat, keahlian profesional, dana, dan akses media, untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam melawan aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gerakan ini dalam menghadapi kebijakan dan keputusan yang tidak pro-rakyat serta mencari solusi yang dapat diterapkan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai gerakan sosial penolakan atau perlawanan terhadap kebijakan atau praktik yang dianggap merugikan telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Salah satu contoh adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi Karina Sari (2017), yang meneliti gerakan sosial warga Desa Lakardowo yang berjuang untuk menutup industri limbah ilegal yang telah mencemari lingkungan hidup. Warga Desa Lakardowo melakukan gerakan ini dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang mereka miliki untuk melakukan mobilisasi dan mendesak pihak berwenang agar menghentikan kegiatan industri tersebut yang berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat lokal, dengan dukungan dari berbagai pihak, dapat mengorganisir gerakan penolakan untuk melawan kebijakan yang merugikan mereka.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Rubyanti Alwiyah Mahrída (2017), yang meneliti gerakan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang menentang pembangunan hotel di atas sumber mata air di daerah mereka. Masyarakat setempat, yang khawatir akan dampak pembangunan terhadap kelangsungan sumber air mereka, melakukan berbagai upaya untuk menggagalkan rencana pembangunan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya mengandalkan jalur hukum, tetapi juga jalur non-hukum untuk menyampaikan penolakan mereka. Mereka berusaha memobilisasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, untuk memperjuangkan hak mereka atas sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Penelitian ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat bergerak dengan memanfaatkan berbagai saluran, baik hukum maupun non-hukum, untuk melawan keputusan yang dianggap merugikan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Eko Cahyo R.A., (2015) mengkaji gerakan sosial yang muncul di Kecamatan Sekaran sebagai respons terhadap polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran timah di sebuah pabrik. Masyarakat Kecamatan Sekaran merasa terancam oleh dampak polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik tersebut, yang menyebabkan masalah kesehatan dan mengganggu kualitas hidup mereka. Sebagai respons, masyarakat melakukan gerakan penolakan dan memobilisasi warga lainnya untuk bergabung dalam gerakan tersebut. Gerakan ini berfokus pada upaya menekan pemerintah untuk menangani masalah polusi asap timah yang merugikan

masyarakat. Penelitian ini menggambarkan bagaimana masyarakat dapat memobilisasi kekuatan kolektif mereka untuk memperjuangkan lingkungan yang lebih baik, dengan cara menuntut tanggung jawab dari perusahaan yang terlibat serta pemerintah yang dianggap gagal memberikan perlindungan terhadap warganya.

Dari beberapa contoh penelitian di atas, dapat dilihat bahwa gerakan sosial penolakan seringkali berawal dari masalah lingkungan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan atau praktik tertentu. Gerakan-gerakan ini umumnya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk memobilisasi dukungan, baik dari masyarakat lokal maupun dari pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap isu yang diangkat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu gerakan sosial sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memobilisasi sumber daya yang ada, termasuk dukungan sosial, dana, dan akses media, untuk memperjuangkan tujuan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Gerakan penolakan yang terjadi di Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, berawal dari rasa trauma yang mendalam akibat bencana banjir besar yang terjadi sebelumnya. Banjir tersebut disebabkan oleh pembangunan tanggul di Sungai Saddang yang tidak diimbangi dengan kajian lingkungan dan sosial yang memadai. Kejadian ini menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, seperti hil-

angnya tanah pertanian, kebun, serta pemukiman warga yang terendam oleh luapan air sungai. Akibat bencana tersebut, masyarakat Desa Salipolo merasa tidak hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga terancam secara sosial dan ekologis.

Trauma akibat bencana tersebut menjadi latar belakang utama munculnya Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo yang berjuang menentang rencana pertambangan pasir ilegal di sepanjang DAS Sadang. Masyarakat khawatir bahwa kegiatan pertambangan pasir ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah, yang akan memperburuk dampak banjir, abrasi, dan longsor yang sudah mereka alami sebelumnya. Oleh karena itu, penolakan terhadap pertambangan pasir ilegal ini menjadi sangat penting bagi mereka, bukan hanya untuk melindungi lingkungan hidup, tetapi juga untuk menjaga kelangsungan hidup mereka sebagai masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam yang ada.

Gerakan sosial ini, meskipun memiliki kesamaan dalam hal penolakan terhadap aktivitas yang dianggap merusak lingkungan, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penelitian lainnya. Gerakan ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak memihak kepada masyarakat, dan lebih fokus pada kepentingan pihak-pihak yang memiliki modal besar, seperti perusahaan tambang. Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo berjuang untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil mengenai pengelolaan sumber daya alam di

wilayah mereka tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting dari gerakan ini adalah proses mobilisasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Salipolo. Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo berhasil mengorganisir masyarakat lokal untuk bersatu dalam penolakan terhadap pertambangan pasir ilegal, meskipun sebelumnya terdapat ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pihak-pihak berwenang. Salah satu strategi utama yang digunakan oleh gerakan ini adalah mengumpulkan massa dan anggota untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pertambangan. Aksi-aksi ini tidak hanya bertujuan untuk menyuarakan penolakan, tetapi juga untuk menarik perhatian media dan pemerintah agar lebih memperhatikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Selain aksi demonstrasi, gerakan ini juga memanfaatkan relasi dengan berbagai pihak, baik yang berada di luar desa maupun di dalam desa itu sendiri. Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo menjalin hubungan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan media untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam perjuangan melawan pertambangan ilegal. Selain itu, mereka juga mengandalkan dukungan dari pihak-pihak yang memiliki keahlian profesional, seperti ahli lingkungan, untuk membantu mereka dalam menyusun argumen-argumen yang kuat mengenai dampak negatif dari kegiatan

pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Dengan memobilisasi berbagai sumber daya tersebut, Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo berhasil menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Mereka berhasil menunjukkan bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Selain itu, gerakan ini juga memberikan contoh bagaimana mobilisasi sumber daya, baik berupa dukungan masyarakat, dana, maupun akses media, dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan publik dalam menghadapi ancaman yang berasal dari kegiatan industri yang tidak terkendali.

Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana gerakan sosial yang muncul sebagai respons terhadap masalah lingkungan dapat berkembang dan bertransformasi menjadi suatu kekuatan yang signifikan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Melalui pemahaman tentang strategi dan proses mobilisasi yang dilakukan oleh Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika gerakan sosial dalam konteks pertambangan dan perlindungan lingkungan di Indonesia.

TINJAUAN TEORETIS

Penelitian ini menggunakan teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*) sebagai landasan dalam menganalisis gerakan sosial yang terjadi di Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dalam menanggapi rencana tambang ilegal di Sungai Saddang. Teori mobilisasi sumber daya merupakan pendekatan yang banyak digunakan untuk memahami bagaimana gerakan sosial dapat berkembang dan berhasil mencapai tujuannya (Suryono, 2001). Teori ini berfokus pada bagaimana sumber daya yang tersedia, baik itu berupa material, sosial, maupun simbolik, dimobilisasi untuk mendukung perjuangan suatu kelompok atau komunitas dalam mencapai tujuan bersama. Dengan adanya sumber daya yang dikelola dan dimobilisasi secara efektif, gerakan sosial dapat memperoleh keberhasilan dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi (Sukmana, 2016).

Dalam konteks ini, teori mobilisasi sumber daya dapat digunakan untuk memahami dinamika gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo yang berjuang menentang rencana pertambangan pasir ilegal di DAS Saddang. Gerakan ini berawal dari kekhawatiran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan yang tidak terkendali, serta trauma akibat banjir besar yang pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat merasa perlu untuk mengorganisir diri mereka untuk menanggapi ancaman ini, dan teori mobilisasi sumber daya memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana

mereka memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Teori ini mengemukakan bahwa keberhasilan gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pendukung yang tersedia untuk mendukung mobilisasi gerakan tersebut (Chalid, 2022). Salah satu faktor yang penting adalah sumber daya yang dimiliki oleh kelompok yang terlibat dalam gerakan sosial. Dalam hal ini, sumber daya dapat berupa berbagai hal, seperti kepemimpinan yang kuat, dukungan dari berbagai kelompok koalisi, dana yang cukup untuk mendukung aksi-aksi yang dilakukan, serta akses ke media untuk memperjuangkan tujuan gerakan. Tanpa sumber daya yang memadai, gerakan sosial cenderung tidak dapat berkembang dan menghadapi tantangan dengan efektif.

Menurut teori mobilisasi sumber daya, gerakan sosial dapat muncul apabila terdapat faktor-faktor pendukung yang tersedia untuk mendukung mobilisasi tersebut. Faktor-faktor ini meliputi adanya kelompok atau individu yang memiliki kapasitas untuk mengorganisir dan memimpin gerakan, serta adanya dukungan dari pihak-pihak yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung perjuangan tersebut. Salah satu aspek yang sangat penting dalam teori ini adalah adanya pengorganisasian yang terstruktur dan rasional, yang memungkinkan gerakan sosial untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan cara yang efektif dan efisien.

Para penganut teori mobilisasi sumber daya berpendapat bahwa kesuksesan suatu gerakan sosial sangat bergantung pada faktor-faktor seperti kepemimpinan yang efektif, kemampuan untuk mengorganisir dan memobilisasi anggota, serta adanya teknik yang tepat dalam melakukan aksi-aksi protes atau advokasi (Sari, 2017). Dalam hal ini, kepemimpinan dianggap sebagai elemen kunci yang dapat memotivasi dan mengarahkan anggotanya untuk terlibat dalam gerakan. Tanpa adanya kepemimpinan yang kuat, gerakan sosial cenderung tidak memiliki arah yang jelas dan dapat kehilangan momentum yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka.

Teori mobilisasi sumber daya juga menekankan pentingnya aspek organisasi dalam gerakan sosial (Putri et al., 2022). Organisasi yang terstruktur dengan baik memungkinkan kelompok untuk mengelola dan mendistribusikan sumber daya secara efektif. Dalam hal ini, organisasi gerakan sosial akan memfasilitasi koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam gerakan, serta memastikan bahwa semua sumber daya yang tersedia digunakan dengan cara yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi yang efektif juga memungkinkan gerakan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi dan tantangan yang muncul sepanjang perjalanan perjuangan mereka.

Selain kepemimpinan dan organisasi, teknik yang digunakan dalam gerakan sosial juga menjadi faktor yang menentukan kesuksesan suatu gerakan. Teknik yang di-

maksud dapat mencakup berbagai strategi, seperti demonstrasi, kampanye publik, penggunaan media sosial, serta mobilisasi massa dalam jumlah besar untuk menarik perhatian publik dan pihak berwenang. Dalam konteks gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo, salah satu teknik yang digunakan adalah melakukan aksi demonstrasi untuk menekan pihak-pihak yang terlibat dalam rencana pertambangan ilegal agar memperhatikan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Demonstrasi ini menjadi sarana yang efektif untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana tersebut dan menarik perhatian media serta publik.

Sumber daya dalam konteks mobilisasi gerakan sosial tidak hanya terbatas pada kepemimpinan atau organisasi. Sumber daya yang sangat penting lainnya adalah dukungan keuangan atau dana yang cukup untuk mendukung kegiatan gerakan. Dalam banyak gerakan sosial, dana diperlukan untuk membiayai berbagai aktivitas, seperti penyediaan logistik untuk aksi demonstrasi, publikasi materi kampanye, serta penyelenggaraan pertemuan atau seminar yang dapat mendidik masyarakat dan menarik perhatian media (Hardianto, 2020). Oleh karena itu, dukungan dana menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam kesuksesan suatu gerakan sosial.

Selain dana, keahlian profesional juga merupakan sumber daya yang penting dalam gerakan sosial. Keahlian ini bisa berupa keahlian dalam bidang hukum, lingkungan, atau komunikasi massa yang

dapat digunakan untuk memperkuat argumen-argumen yang diajukan oleh gerakan sosial. Dalam kasus Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo, dukungan dari profesional di bidang lingkungan dan hukum sangat membantu mereka dalam menyusun argumen yang kuat mengenai dampak negatif dari pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Keahlian ini memberikan legitimasi lebih pada gerakan dan membantu meningkatkan efektivitas mobilisasi yang dilakukan.

Sumber daya lainnya yang tak kalah penting adalah akses pada media. Media, baik itu media massa maupun media sosial, memainkan peran yang sangat vital dalam gerakan sosial modern. Akses pada media memungkinkan gerakan untuk menyebarkan pesan mereka secara luas dan mencapai audiens yang lebih besar. Dalam konteks Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo, media sosial menjadi salah satu alat utama untuk mengorganisir massa dan mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pertambangan ilegal. Melalui media sosial, gerakan ini dapat memperluas jangkauan mereka dan memobilisasi lebih banyak orang untuk bergabung dalam aksi penolakan.

Menurut Gordon J. DiRenzo dalam bukunya *Human Social Behaviour: Concepts and Principles of Sociology* (1990), sumber daya yang dimaksud dalam teori mobilisasi sumber daya mencakup berbagai elemen penting, seperti kepemimpinan, pendukung atau pengikut, aset keuangan, pro-

fesional yang berbakat, dan akses pada media. Semua elemen ini bekerja secara bersamaan untuk mendukung kelangsungan dan kesuksesan suatu gerakan sosial. Dalam konteks Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo, semua elemen tersebut digunakan untuk memobilisasi masyarakat agar bergabung dalam penolakan terhadap pertambangan ilegal dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo berhasil mengorganisir aksi-aksi penolakan yang efektif dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik itu individu maupun organisasi. Mereka mampu memobilisasi kekuatan sosial yang besar untuk menghadapi masalah yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap kehidupan mereka dan lingkungan sekitar. Melalui penerapan teori mobilisasi sumber daya, penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana sumber daya dapat digunakan untuk memperkuat gerakan sosial dalam perjuangan mereka untuk keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.

Teori mobilisasi sumber daya memberikan kerangka yang sangat berguna dalam memahami bagaimana gerakan sosial dapat berkembang dan berhasil mencapai tujuannya. Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, gerakan sosial dapat meningkatkan daya tawar mereka, memperoleh dukungan yang lebih luas, dan melaksanakan aksi-aksi yang efektif untuk menanggapi masalah yang dihadapi. Dalam konteks gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo, teori ini memberikan ga-

mbaran yang jelas tentang bagaimana gerakan tersebut berhasil mengorganisir masyarakat untuk menanggapi ancaman terhadap lingkungan dan kehidupan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara rinci tentang strategi gerakan sosial yang dilakukan oleh Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo dalam menanggapi rencana tambang ilegal di Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai proses mobilisasi sumber daya oleh gerakan tersebut. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif (Moleong, 2006), yaitu mereka yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dalam gerakan ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, berita, dan dokumen terkait yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan para tokoh masyarakat, pemimpin gerakan, serta individu yang terlibat langsung dalam gerakan sosial tersebut, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai dinamika yang terjadi. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti tertulis atau arsip yang dapat memperkaya informasi terkait

gerakan tersebut (Sugiyono, 2012). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang sistematis dan analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul, serta untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi yang diterapkan oleh gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo dalam menghadapi isu pertambangan ilegal di daerah mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo dalam Penolakan Pertambangan Pasir Ilegal

Kemunculan Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo dilatarbelakangi oleh aktivitas tambang ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pinrang. Tambang pasir yang dilakukan di bantaran Sungai Saddang telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan dampak lingkungan dan ekonomi yang merugikan. Masyarakat menyadari bahwa wilayah Desa Salipolo tidak masuk dalam area peruntukan tambang sesuai dengan RTRW, yang kemudian mendorong terbentuknya gerakan untuk menolak aktivitas ilegal ini. Aliansi ini terdiri dari masyarakat Desa Salipolo dan desa-desa sekitar yang memiliki kepentingan dan kesadaran yang sama dalam menjaga lingkungan mereka.

Salah satu strategi awal yang dilakukan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo adalah mengumpulkan massa dari berbagai desa. Pengumpulan massa ini melibatkan Desa

Salipolo, Desa Bababinanga, dan Desa Paria yang juga akan terkena dampak aktivitas tambang. Dengan memperbesar jumlah pendukung, gerakan ini berhasil memperkuat solidaritas dan menciptakan basis yang kuat untuk aksi kolektif mereka. Sebelum memulai aksi di Desa Salipolo, perusahaan tambang sempat beroperasi di Desa Bababinanga pada tahun 2017, namun ditolak masyarakat. Penolakan ini terjadi karena ketidaklengkapan izin dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Akhirnya, perusahaan tambang berpindah ke Desa Salipolo, yang menjadi alasan masyarakat untuk membentuk aliansi guna mencegah terulangnya masalah serupa.

Selain pengumpulan massa, Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo juga melakukan kolaborasi dengan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti WALHI Sulawesi Selatan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Kolaborasi ini dilakukan untuk memperkuat posisi gerakan dan mendapatkan dukungan dari pihak eksternal yang memiliki kapasitas advokasi lingkungan. LSM-LSM ini tidak hanya membantu dalam penyuluhan dan pendidikan terkait lingkungan, tetapi juga memberi pengetahuan tentang hak-hak lingkungan dan prosedur hukum yang relevan. Hal ini membantu masyarakat untuk lebih memahami dan menyadari langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam aksi mereka.

Aksi demonstrasi menjadi strategi penting yang sering dilakukan oleh Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo. Demonstrasi dil-

akukan di kantor-kantor pemerintah seperti DPR Kabupaten Pinrang dan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, di mana masyarakat menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada pemangku kepentingan. Tuntutan ini berfokus pada penegakan RTRW yang melarang tambang di wilayah mereka dan perlindungan hak masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan aman. Aksi demonstrasi ini tidak hanya menekankan urgensi tuntutan mereka, tetapi juga bertujuan untuk menarik perhatian publik terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Desa Salipolo.

Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo menyusun strategi dengan melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk memanfaatkan berbagai aspek dalam menolak aktivitas tambang ilegal. Dengan cara ini, mereka berhasil menciptakan aliansi yang inklusif dan kuat serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan ini juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola lingkungan, sehingga mereka merasa memiliki hak dan kewajiban dalam melindungi wilayah mereka dari ancaman tambang ilegal. Strategi-strategi ini merupakan langkah penting dalam membangun gerakan yang solid dan berdampak.

Proses Mobilisasi Sumber Daya oleh Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo

Proses mobilisasi sumber daya oleh Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo dimulai dengan adanya pemimpin yang memainkan peran sentral dalam mengorganisir dan mengarahkan gerakan. Pemimpin ini berasal dari tokoh masyarakat Desa Salipolo yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin aksi dan koordinasi. Pemimpin gerakan ini menjadi katalisator dalam menggerakkan massa dan menjaga semangat perjuangan masyarakat. Dengan adanya pemimpin yang kuat, Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo dapat lebih terstruktur dalam merencanakan dan menjalankan setiap aksi protes yang diadakan.

Selain kepemimpinan yang kuat, dukungan dari massa yang berasal dari desa-desa di sekitar Salipolo juga merupakan sumber daya yang sangat penting. Dukungan kolektif ini memberikan legitimasi dan kekuatan bagi gerakan, sehingga mampu menekan pemerintah dan pihak perusahaan. Massa yang terlibat tidak hanya berasal dari Desa Salipolo, tetapi juga dari Desa Bababinanga dan Desa Paria, yang memiliki kepentingan yang sama dalam menolak tambang ilegal. Kolaborasi ini membentuk jaringan komunitas yang memperkuat suara gerakan dalam menuntut hak mereka atas lingkungan yang sehat.

Gambar 1. Aksi Demonstrasi Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024).

Dukungan finansial menjadi aspek penting lainnya dalam proses mobilisasi sumber daya. Dana yang digunakan untuk kegiatan gerakan ini diperoleh dari iuran masyarakat setempat dan donasi dari donatur yang mendukung gerakan. Dana ini diperlukan untuk membiayai kebutuhan operasional, seperti konsumsi saat pertemuan, transportasi saat aksi, dan perlengkapan lainnya. Dengan adanya dana yang cukup, gerakan dapat menjalankan aksinya dengan lebih lancar dan efektif, serta meminimalkan hambatan logistik yang mungkin muncul.

Mobilisasi sumber daya juga melibatkan dukungan dari para profesional dan ahli, terutama yang berasal dari LSM seperti WALHI dan LBH. Para ahli ini memberikan arahan strategis tentang cara menghadapi permasalahan tambang, sehingga gerakan dapat berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan memiliki landasan argumentasi yang kuat. Peran LSM ini sangat penting, karena mereka memiliki pengalaman dalam advokasi lingkungan yang tidak dimiliki oleh masyarakat desa. Mere-

ka membantu Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo dalam memahami hak-hak lingkungan yang dilindungi oleh hukum dan strategi advokasi yang efektif.

Akses terhadap media massa menjadi sumber daya terakhir yang dimobilisasi oleh Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo. Melalui media, aliansi dapat menyebarkan informasi mengenai aktivitas tambang ilegal di Salipolo kepada masyarakat yang lebih luas. Media lokal dan nasional menjadi platform penting dalam membangun opini publik yang mendukung gerakan mereka. Dengan publikasi berita di koran atau website LSM, masalah ini mendapatkan perhatian yang lebih luas, sehingga meningkatkan dukungan bagi gerakan dan memberi tekanan tambahan pada pihak yang berwenang.

Tantangan dan Hambatan Gerakan

Dalam menjalankan aksinya, Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo menghadapi berbagai tantangan eksternal, terutama tekanan dari pihak perusahaan dan pemerintah. Perusahaan tambang yang memiliki kepentingan ekonomi besar seringkali mencoba melobi pemerintah untuk mendapatkan izin operasional, meskipun hal itu melanggar RTRW. Tekanan ini membuat perjuangan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo semakin berat karena pemerintah dapat saja mengabaikan tuntutan masyarakat demi kepentingan ekonomi. Untuk menghadapi tantangan ini, aliansi terus berupaya meningkatkan dukungan publik agar tuntutan mereka sulit diabaikan.

Selain tekanan dari pihak eksternal, keterbatasan sumber daya internal juga menjadi tantangan besar bagi gerakan ini. Keterbatasan dana, kurangnya akses terhadap teknologi informasi, dan kurangnya pengetahuan tentang hukum lingkungan seringkali menghambat aksi mereka. Gerakan ini bergantung pada sumbangan dan iuran sukarela dari masyarakat, yang tentunya tidak selalu cukup untuk membiayai semua kebutuhan aksi. Untuk mengatasi keterbatasan ini, aliansi bekerja sama dengan LSM yang dapat menyediakan fasilitas seperti akses media dan advokasi hukum.

Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo juga menghadapi tantangan dalam menjaga soliditas internal. Beragamnya latar belakang dan kepentingan masyarakat yang tergabung dalam aliansi dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Misalnya, beberapa masyarakat mungkin memiliki kepentingan ekonomi dengan perusahaan tambang dan tidak sepenuhnya setuju dengan aksi protes. Untuk menjaga kesatuan gerakan, pemimpin aliansi selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak.

Di sisi lain, kurangnya dukungan dari pemerintah menjadi tantangan yang signifikan dalam mempertahankan keberlanjutan gerakan. Meskipun gerakan ini telah melakukan demonstrasi dan penyuluhan, pemerintah daerah tidak selalu memberikan tanggapan positif. Gerakan ini tetap berusaha meningkatkan tekanan dengan menggandeng media dan memperluas jaringan dukungan mereka. Dengan cara ini,

Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo berharap dapat menarik perhatian pemangku kebijakan yang lebih tinggi.

Untuk menghadapi semua tantangan ini, Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo melakukan pendekatan adaptif dan fleksibel. Mereka terus menyesuaikan strategi mereka dengan kondisi lapangan, mengandalkan kolaborasi, dan mengembangkan berbagai bentuk aksi yang efektif. Melalui komitmen dan kesabaran, gerakan ini berhasil mempertahankan eksistensinya meskipun menghadapi berbagai hambatan. Kesadaran akan pentingnya tujuan bersama dalam melindungi lingkungan tetap menjadi landasan utama gerakan ini.

KESIMPULAN

Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mencapai tujuan bersama dalam menolak pertambangan ilegal. Gerakan ini terbentuk sebagai respons terhadap ancaman ekologis dan pelanggaran hak lingkungan di Desa Salipolo dan sekitarnya. Meskipun perjuangan mereka belum sepenuhnya berhasil menghentikan aktivitas tambang, keberadaan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo mencerminkan lahirnya gerakan sosial baru yang memperjuangkan isu-isu lingkungan dan kemanusiaan. Aksi kolektif yang dilakukan oleh aliansi ini menjadi langkah strategis untuk membangun solidaritas dan memperkuat dukungan komunitas, sambil meningkatkan kesadaran publik akan dampak negatif tambang ilegal.

Pengorganisasian gerakan ini mengikuti prinsip-prinsip dalam teori mobilisasi sumber daya, yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk menggerakkan aksi sosial. Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo telah melibatkan pemimpin yang mampu memobilisasi kelompok, mengoordinasikan dukungan dari masyarakat sekitar, mengelola sumber dana dari sumbangan lokal, serta bekerja sama dengan LSM dan ahli dalam advokasi lingkungan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan akses media untuk menyebarluaskan isu ini kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan pengorganisasian yang baik, gerakan ini tidak hanya mendapatkan legitimasi dari masyarakat tetapi juga mampu menjaga konsistensi dalam perjuangannya. Kendati masih dalam proses mencapai tujuan akhir, strategi dan upaya mobilisasi yang dilakukan menunjukkan ketangguhan gerakan ini dalam melawan praktik tambang ilegal yang merusak.

Selain itu, dampak jangka panjang dari gerakan ini terhadap kebijakan pertambangan di tingkat regional dan nasional belum dianalisis secara komprehensif. Artikel ini merekomendasikan kajian lebih lanjut tentang efektivitas strategi gerakan sosial dalam mendorong perubahan kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang peran gerakan sosial dalam menghadapi isu lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyo R.A., E. (2015). *Gerakan Anti Pembakaran Timah: Studi Kasus Gerakan Sosial pada Masyarakat Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dalam Menolak Aktivitas Pembakaran Timah*, (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Chalid, P. (2022). Teori Pertumbuhan. In *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Terbuka.
- DiRenzo, G. J. (1990). *Human social behavior: Concepts and principles of sociology*. Holt, Rinehart and Winston.
- Estefania., Sativa, E., & Noorliana, E. (2021). Analisis Pertumbuhan PDB Indonesia Melalui Pengembangan Sektor Pertambangan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5). 756–765. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.293>
- Hardianto, F. (2020). *Gerakan Sosial – Politik (Studi Kasus: Gerakan Sosial #2019gantipresiden)*, (Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang).
- Mahrida, R. A. (2017). Strategi gerakan penolakan pembangunan hotel The Rayja di Kota Batu. *Jurnal Politik Muda*, 6(3), 201-206.

- Meleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Rosda Karya.
- Putri, T. A., Sekarningrum, B., & Fedryansyah, M. (2022). Gerakan Sosial dan Mobilisasi Sumber Daya dalam Memperjuangkan Pengakuan Kepercayaan Berbeda. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 9(1), 22-31. <https://doi.org/10.24036/scs.v9i1.381>
- Sari, D. K. (2017). Strategi mobilisasi gerakan masyarakat dalam penutupan industri pengelolaan limbah B3 di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 127-134.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing.
- Suryono, A. (2001). *Teori dan Isu Pembangunan*. UM Press.
- Fatir, M. D. (2019, November). *Walhi Sulsel Menduga Tambang di Desa Salipolo Langgar Tata Ruang*. ANTARA News Makassar. <https://makassar.antaranews.com/berita/150124/walhi-sulsel-menduga-tambang-di-desa-salipolo-langgar-tata-ruang>
- Nursam, M. (2019, November 6). *Walhi Sulsel: Lokasi Tambang di Salipolo Langgar Perda*. FAJAR. <https://fajar.co.id/2019/11/06/walhi-sulsel-lokasi-tambang-di-salipolo-langgar-perda/?page=all>

Webiste

- Bachtiar, B. (2019, November 6). *Aktivitas Tambang di Desa Salipolo, Walhi: Usut Tindak Pidana Tata Ruang*. Radar Online. <https://www.radaronline.id/2019/11/04/aktivitas-tambang-di-desa-salipolo-walhi-usut-tindak-pidana-tata-ruang/>